



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 221 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS
MASYARAKAT PADUKUHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah:

1. melaksanakan pembinaan kinerja Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan di Kabupaten Bantul;
2. menetapkan kebijakan fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
3. memberikan rekomendasi prioritas Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan; dan
4. melaksanakan kunjungan ke lokasi kegiatan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan.

b. Tim Pelaksana:

1. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap proposal Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Pemerintah Kalurahan;
2. menyusun daftar prioritas Kalurahan penerima Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;

3. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kapanewon dan Kalurahan terkait Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
4. memberikan saran, arahan, dan rekomendasi kepada Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan terkait Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
6. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Kapanewon dan/atau Pemerintah Kalurahan; dan
7. menyiapkan laporan kepada Bupati.

c. Sekretariat:

1. menerima, mencatat, menghimpun dan mendata proposal yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. bersama dengan Tim Pelaksana Fasilitasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kapanewon;
3. menyiapkan dan melaksanakan administrasi Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
4. menyiapkan bahan kegiatan Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
5. menyiapkan akomodasi kegiatan Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;
6. mengajukan proses pencairan dana Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan; dan

7. menyimpan kelengkapan dokumen Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan dari Kapanewon dan/atau Pemerintah Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 221 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 PROGRAM PEMBERDAYAAN
 BERBASIS MASYARAKAT
 PADUKUHAN KABUPATEN
 BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Ketua	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>9. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.</p> <p>11. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p>	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>2. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Subbagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.</p> <p>10. Unsur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	<p>Tlau Sakti S, S.S., S.Hum.</p> <p>Suharyana, S.S., M.Si</p> <p>Widodo, S.E.</p> <p>Supangat, S.K.M.</p> <p>Rudi Suharta, S.I.P., M.M.</p> <p>Himawan Sulistyoyo, S.Pd.</p>

1	2	3	4
4.	Sekretariat	<p>11. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Tenaga Pendamping Profesional Desa Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Masyarakat</p> <p>Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Azakhia Fitriyati, S.Pd.</p> <p>Siti Nurhidayati, S.H., M.H.</p> <p>1. Slamet, S.Pd. 2. Wratsogko Sri K, S.T.</p> <p>1. Yasir 2. Prihatin Sri Wahyuni</p> <p>1. Wimbo Martanto 2. Sriningsih 3. Dewantoro, S.Tr.I.P. 4. Risanto Wibowo, S.Si. 5. Nira Martiyana, A.Md.Kom</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH